

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA KABUPATEN
BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN**

2023

Disusun Oleh

**BAPPEDA KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Bappeda kabupaten Bener Meriah merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan masyarakat umum secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Redelong, 02 Januari 2024
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Bener Meriah



ALPAHMI, ST.M.A.P
Nip. 19740325 200112 1 001

CS Digitalized dengan CamScanner

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Bener Meriah yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bappeda Kabupaten Bener Meriah ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan;
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Perlunya asistensi terhadap dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah agar mampu mencapai sasaran dan target indikator yang ada di dalam Rencana Pembangunan Daerah sehingga capaian kinerja kepala daerah menjadi lebih baik.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Bappeda Kabupaten Bener Meriah dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Tugas dan Fungsi.....	2
1.3 Isu-isu Strategis	4
1.4 Keadaan Pegawai	4
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	4
1.6 Keuangan	5
1.7 Sistematisasi LKjIP.....	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	7
2.1. Perencanaan Strategis.....	7
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	7
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	9
2.1.3 Strategi dan arah Kebijakan.....	10
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023.....	14
2.3.1 Target Belanja Bappeda Kabupaten Bener Meriah	14
2.4 Instrumen Pendukung.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023	16
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	17
3.2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	18
3.2.2 Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Daftar Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023	5
Tabel 2.1. Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026.....	10
Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026.....	20
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
Tabel 2.4. Target Belanja Bappeda Kabupaten Bener Meriah APBK Perubahan Tahun 2023..	14
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	16
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023	17
Tabel 3.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	18
Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kinerja Bappeda Kabupaten Bener meriah Tahun 2023	19
Tabel 3.5. Target Tahunan Jangka Menengah	20
Tabel 3.6. Target dan Realisasi Kinerja 2023.....	21

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2
---	---



BAB 1

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Permenpan 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 diharapkan dapat:

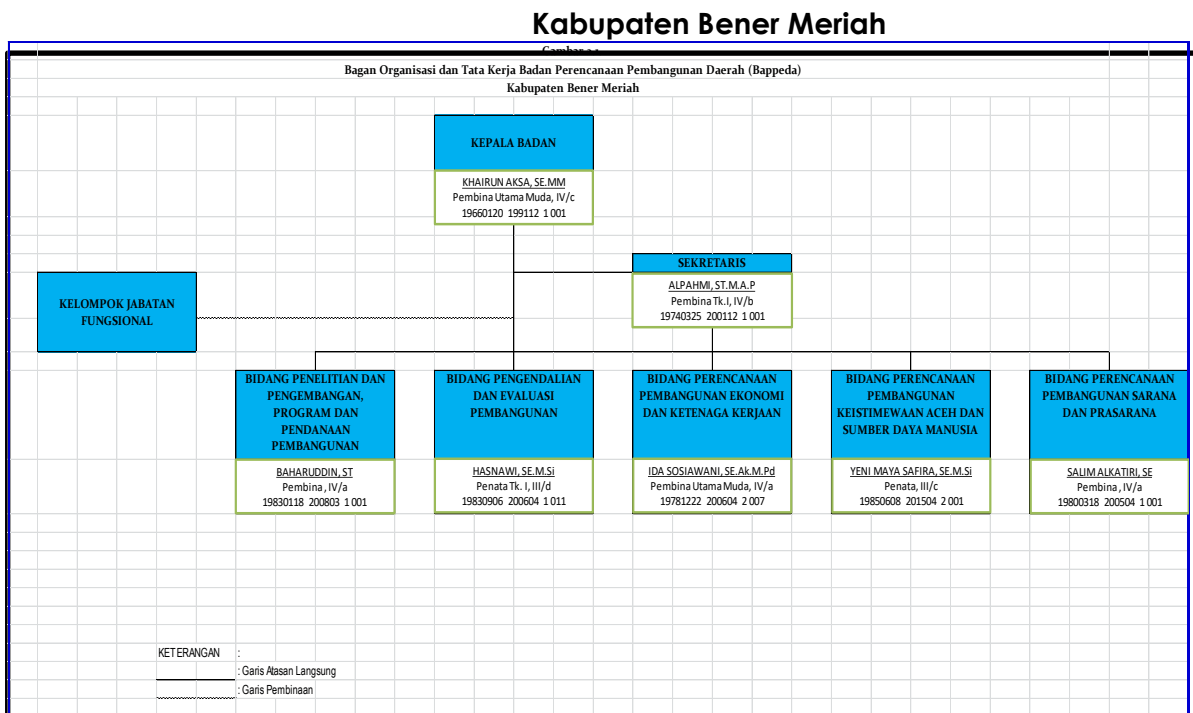
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bappeda Kabupaten Bener Meriah;
2. Mendorong Bappeda Kabupaten Bener Meriah di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Kabupaten Bener Meriah untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Bappeda Kabupaten Bener Meriah di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;

1.1 Struktur Organisasi

Bappeda Kabupaten Bener Meriah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Bappeda Kabupaten Bener Meriah merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



1.2 Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 68 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, perencanaan pembangunan sarana dan prasarana, perencanaan pembangunan keistimewaan aceh dan sumber daya manusia, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta bidang penelitian, pengembangan, program dan pendanaan pembangunan yang terdapat di Kabupaten Bener Meriah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga badan;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Pelaksanaan pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
5. Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, program dan pendanaan pembangunan;

6. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dana urusan bersama, tugas perbantuan dan dekonsentrasi;
7. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan pembangunan dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
8. Pelaksanaan UPTB; dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Bupati tersebut adalah:

1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
2. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
3. Menyusun rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) daerah;
4. Melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK);
5. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
6. Melakukan Koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), berdasarkan hasil Musrenbang;
7. Mengkoordinasikan rencana program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran;
8. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran;
9. Meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran;
10. Melakukan evaluasi, pengendalian, data dan publikasi perencanaan pembangunan daerah;
11. Melakukan penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, pembangunan, pemerintahan dan pengembangan inovasi dan teknologi;
12. Melakukan penyusunan rencana program dan pendanaan pembangunan serta kerjasama pembangunan;
13. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

1.3 Isu-isu Strategis

Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Bappeda Kabupaten Bener Meriah, antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan;
2. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran; dan
3. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan.

1.4 Keadaan Pegawai

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Bener Meriah diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Bappeda Kabupaten Bener Meriah sampai dengan 31 Desember 2023, tercatat sebanyak 32 pegawai yang terdiri 20 pejabat struktural, 12 pejabat fungsional umum dan Tenaga Honorir Sebanyak 13 Orang.

Dengan kondisi SDM yang ada, Bappeda berusaha menjalankan tugas dan fungsi secara optimal dengan dukungan Tenaga Ahli maupun tenaga Non PNS untuk mengimbangi beban kerja yang menjadi tugas - tugas Bappeda. Profil kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan, dan kebutuhan pegawai secara ideal.

Berdasarkan data diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Bappeda Kabupaten Bener Meriah terutama untuk jabatan fungsional umum agar dapat memberikan kinerja secara maksimal serta pegawai di Bappeda sebagian besar merupakan pegawai Golongan III.

Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Bappeda Kabupaten Bener Meriah lebih banyak didominasi oleh Sarjana S1 kemudian Sarjana S2 ada enam orang terkait dengan jabatan fungsional Umum ada yang berijazah SLTA yang sedang menempuh pendidikan sarjana.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Bappeda Kabupaten Bener Meriah sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Bappeda Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Daftar Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan / Kondisi
1	Kendaraan Roda 4	2	Baik
2	Kendaraan Roda 2	7	Baik
3	Alat kantor dan rumah tangga	125	Baik
4	Alat studio dan alat komunikasi	50	Baik
5	Bangunan gedung	2	Baik
6	Jaringan	2	Baik

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Bappeda Kabupaten Bener Meriah. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2023 berasal dari APBK Kabupaten Bener Meriah. Pada Tahun Anggaran 2023, Bappeda Kabupaten Bener Meriah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.5.664.353.025,00,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Bener Meriah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Bener Meriah Potensi yang menjadi ruang lingkup Perangkat Daerah dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

2.1 Perencanaan Strategis

Bappeda Kabupaten Bener Meriah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026. Renstra Bappeda Kabupaten Bener Meriah merupakan manifestasi komitmen Bappeda Kabupaten Bener Meriah dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Bappeda Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026

tidak terlepas dari pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2017-2022).

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Bener Meriah merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama empat tahun, sesuai dengan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 2023-2026. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Bappeda Kabupaten Bener Meriah yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan, Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

21.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Bupati Bener Meriah tidak tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

hanya memuat tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Hal ini merupakan Amanah dari Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022.

Tujuan Daerah

Dalam dokumen RPD Pemerintah Kabupaten Bener Meriah memuat 4 Tujuan Daerah. Berikut Tujuan Daerah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah :

1. Meningkatkan Kepatuhan dalam pelaksanaan syariat islam.
2. Terwujudnya Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).
3. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia
4. Terwujudnya peningkatan Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat.

Sasaran Daerah

Dalam dokumen RPD Pemerintah Kabupaten Bener Meriah memuat 13 Sasaran Daerah. Berikut Sasaran Daerah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah :

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan hukum syariat Islam.
 2. Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel.
 3. Meningkatkan Level Maturitas SPIP
 4. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan.
 5. Meningkatkan Akses dan kualitas kesehatan.
 6. Peningkatan Daya Saing Sektor Pertanian
 7. Peningkatan Ekspor Komoditi
 8. Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perekonomian
 9. Peningkatan Kesempatan Kerja Sektor Formal
 10. Pengembangan Sektor Pariwisata
 11. Penurunan Tingkat Kemiskinan
 12. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
 13. Peningkatan Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah dalam penyusunan Rencana Strategis berdasarkan sasaran ke-2 daerah yaitu Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel. yang berhubungan relevan dengan perencanaan. Tujuan Terwujudnya Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).

harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga menghasilkan outcome yang baik. Untuk itu Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selalu didasarkan untuk memberikan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bener Meriah menjadi lebih baik.

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Bappeda Kabupaten Bener Meriah berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mengacu pada Tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bener Meriah adalah : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dan Terwujudnya Inovasi Daerah yang Berkualitas Sasaran Strategis tujuan pertama adalah Meningkatnya kualitas dan efektifitas perencanaan pembangunan Daerah dengan indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Sedangkan Tujuan Kedua dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah dengan indicator Indek Inovasi Daerah.

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Bappeda Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN PADA TAHUN 2017	TARGET				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya kualitas dan efektifitas perencanaan pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	-	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43
2	Terwujudnya Inovasi Daerah yang Berkualitas	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	-	39	36	37	38	39

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu

ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappeda Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut :

Strategi dan arah kebijakan dibuat sebagai rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPK mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien serta harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Bener Meriah yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda kabupaten Bener Meriah. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran ini kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang akan dijalankan oleh Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah Melalui Kepala Daerah.

Sesuai dengan Tujuan RPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 – 2026, strategi Renstra yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah dalam mencapai tujuan dan sasaran antara lain :

Meningkatkan Peran Mitra Bappeda (Pokja) dalam Pendampingan Koordinasi, Asistensi dan Monitoring Evaluasi Terhadap OPD yang mengampu Program Prioritas Daerah. **Dengan arah kebijakan:**

Penyusunan Dokumen Perencanaan yang sesuai dengan standar dan tata cara.

Meningkatkan Sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya aspirasi terhadap pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Bener Meriah. Dengan **arah kebijakan:**

Peningkatan Kerjasama dengan Aparatur Pemerintahan Desa dalam mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Meningkatkan Perbaikan perencanaan dengan berbasis data kinerja dan pelaporan Dengan **arah kebijakan:**

Penyusunan standar proses perencanaan yang akuntabel.

Meningkatkan Data Dukung dan Bukti Evidence Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Bappeda serta Monitoring dan evaluasi Terhadap

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Pada Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dengan **arah kebijakan:**

Penyusunan Bukti Evidence Pada 8 Area PMPRB Secara Tepat Waktu

Mengikutsertakan Pihak Ketiga dan Tim Ahli dari Universitas dalam melaksanakan penelitian untuk memperoleh Kebijakan Terkait Keberhasilan Strategi Pembangunan, dengan **arah kebijakan:**

Penyusunan Tim Pelaksana Penelitian untuk menghasilkan Suatu Kebijakan Pembangunan Daerah secara tepat sasaran.

Strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan diatas diturunkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya pada level organisasi Bappeda. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang terkait peningkatan pelayanan dan operasional staf. Dengan **arah kebijakan:**

Peningkatan belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk menunjang aktivitas kerja staf Bappeda Peningkatan belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk menunjang aktivitas kerja staf Bappeda.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
1	2	3	4	5		6
1	Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	7,43 Skala 1-10			
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Rp. 1.475.113.000,00
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp. 927.324.000,00
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 157.957.000,00
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 389.832.000,00
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Rp. 1.405.254.000,00
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp. 251.050.000
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp. 607.084.000,00
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp. 477.316.000,00
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp. 3.496.546.530,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
1	2	3	4	5		6
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 102.680.000,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.469.123.540,00
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 523.556.990,00
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 155.100.000,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 156.000.000,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 90.086.000,00
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	41			
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Rp. 152.455.000
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp. 97.858.000,00
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	0

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
1	2	3	4	5		6
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp. 97.858.000,00

Sumber : Bappeda, 2022

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Bappeda Kabupaten Bener Meriah melaksanakan kegiatan dengan rencana anggaran murni yang bersumber dari APBK sebesar Rp. 6.474.771.530,00.

2.3.1 Target Belanja Bappeda Kabupaten Bener Meriah

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Bappeda Kabupaten Bener Meriah menetapkan target belanja sebesar Rp. 4.159.877.990,00,-.

**Tabel 2.4 Target Belanja Bappeda Kabupaten Bener Meriah
APBK Perubahan Tahun 2023**

No	Uraian	Target	Persentase
1	Belanja Operasi	Rp. 4.159.877.990,-	-
2.	Belanja Pegawai	Rp. 2.314.893.540,00,-	
	Jumlah	Rp 6.474.771.530,00,-	-

Sumber : Bappeda, 2023

2.4. Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Bappeda Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Bener Meriah. Bappeda Kabupaten Bener

Meriah selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Bappeda Kabupaten Bener Meriah meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Bappeda Kabupaten Bener Meriah sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada stakeholder.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Bappeda Kabupaten Bener Meriah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Bener Meriah tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Bener Meriah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kabupaten Bener Meriah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai Tabel 3.2 Sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>Meningkatnya kualitas dan efektifitas perencanaan pembangunan Daerah</u>	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	7.43 Skala 1-10	8.80	110	Sangat Baik
2.	<u>Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah</u>	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	43	30	69,76	Sedang

Sumber : Renstra Bappeda, 2022

Bappeda Kabupaten Bener Meriah memiliki 2 (dua) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Bappeda Kabupaten Bener Meriah. Pada tahun 2023, indikator sasaran tersebut satu telah memenuhi target yang ditetapkan **(tercapai 100%)** dari total indikator dengan persentase capaian sebesar 100% dan satu indikator sasaran juga mencapai predikat sangat baik walaupun belum mencapai 100% yaitu, target 39 yang diperoleh adalah 30,59 atau 71,13% dari target yang ditetapkan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dalam Dokumen Rencana Pembangunan daerah sehingga terdapat penyesuaian Tujuan Bappeda Kabupaten Bener Meriah yang baru yaitu Meningkatkan Efektifitas Perencanaan Pembangunan Daerah.

Meningkatnya kualitas dan efektifitas perencanaan pembangunan daerah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan baik program utama dari satu bidang urusan dan sasaran Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah Pada Urusan Penelitian dan Pengembangan maupun program pendukung selama tahun anggaran 2023. Program – program tersebut dilaksanakan oleh bidang sektoral, bidang perencanaan, pengendalian, dan sekretariat. Program – program yang telah diselenggarakan antara lain sebagai berikut :

1. Program utama Urusan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan

- a. Program Perencanaan dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan;
 - b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Program Penelitian dan Pengembangan
2. Program Pendukung Non Urusan
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Program-program di atas masing-masing memberikan kontribusi/dukungan terhadap pencapaian kinerja sasaran Tahun 2023.

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Bappeda Kabupaten Bener Meriah yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tolok ukur capaian Tujuan Terwujudnya Kualitas dan Efektifitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Perencanaan Pembangunan Daerah diukur dengan 1 (Indikator).

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1.	<u>Meningkatnya kualitas dan efektifitas perencanaan pembangunan Daerah</u>	Indeks Perencanaan Pembangunan	
2.	<u>Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah</u>	Indeks Inovasi Daerah	

Sumber : Renstra Bappeda, 2023-2026

Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Dan Efektifitas Perencanaan Pembangunan Daerah diukur melalui 60% capaian sasaran strategis pemda ditambah 20% capaian strategis OPD ditambah 20% capaian Program Daerah pada tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel 3.4 berikut:

**Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Bappeda
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022**

No	Indikator Sasaran	Baseline 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan pembangunan Daerah</u>	-	7.43	8.80	$(8.80/7.43) \times 100\% = 100\%$	118	118
2.	<u>Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah</u>	-	43	30,59	$(30,59/43) \times 100\% = 69,76\%$	43	71.13

Sumber : Bappeda, 2022

Realisasi capaian kinerja Bappeda Tahun 2023 adalah sebesar 118% untuk sasaran Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah. Sedangkan Untuk Sasaran Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah Bappeda Harus Lebih Bekerja keras Lagi pada Tahun 2023 Untuk Pencapaiannya sehingga pada tahun ini kinerja Bappeda Kabupaten Bener Meriah secara umum hampir sepenuhnya telah tercapai.

Jika realisasi kinerja pada tahun 2023 pada sasaran pertama dibandingkan dengan target akhir RPD, maka realisasi sudah melampaui target sebesar 100%. Sedangkan untuk sasaran kedua bappeda harus bekerja keras pada tahun 2023 ini untuk mencapai target tersebut. Target tahunan jangka menengah pada rencana strategis (Renstra) Bappeda ditampilkan pada tabel 3.5. berikut :

Tabel 3.5.Target Tahunan Jangka Menengah

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN PADA TAHUN 2017	TARGET				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya kualitas dan efektifitas perencanaan pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	-	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43
2	Terwujudnya Inovasi Daerah yang Berkualitas	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	-	39	43	44	45	46

Sumber : Renstra Bappeda 2023-2026

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

- Dukungan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian dan statistik.
- Dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda;
- Ketepatan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan;
- Ketersediaan data-data pendukung dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program dan kegiatan;
- Dukungan dari pihak Kemenpan RB yang melaksanakan pembelajaran dalam penyusunan SAKIP.

Faktor Penghambat Belum Tercapainya Sebagian Sasaran Strategis Bappeda Adalah :

- Belum Adanya SDM Fungsional Peneliti Di Bappeda Kabupaten Bener Meriah;
- Minimnya Anggaran dalam Pelaksanaan urusan Penelitian dan Pengembangan;
- Belum Adanya Pelatihan SDM terkait Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Kekurangan SDM Pada Bagian Penelitian dan Pengembangan.

Indikator sasaran Bappeda Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 sama dengan indikator sasaran tahun 2022 sehingga kinerja antara tahun 2023 dan 2022 tidak dapat dibandingkan.

Sasaran, indikator sasaran, target dan realisasi kinerja pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6.Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Uraian		Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi
1	2		3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Hasil Penilaian SAKIP Bappeda Oleh Inspektorat	BB	BB
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda	2 Jenis	2 Jenis
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 Dokumen
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis administrasi keuangan Bappeda	4 Jenis	4 Jenis
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	35 Orang
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Dokumen
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis administrasi umum Bappeda	8 jenis	8 jenis
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
		Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket

No	Uraian		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	Realisasi
1	2		3		4	5
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	2 Jenis
		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Jenis	3 jenis
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis pemeliharaan barang milik daerah	2 Jenis	2 Jenis
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					
				Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah Jenis Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	6 Jenis	6 Jenis
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD	3 Dokumen	3 Dokumen

No	Uraian		Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi
1	2		3	4	5
			Maka Rancangan Teknokratik)		
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1 Berita Acara	1 Berita Acara
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten	1 Berita Acara	1 Berita Acara
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Berita Acara Koordinasi Musrenbang Kecamatan	1 Berita Acara	1 Berita Acara
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	11 Dokumen	11 Dokumen
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Jenis Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah	1 Jenis	1 Jenis
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	35 Orang	35 Orang
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Jenis Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Jenis	2 Jenis
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan daerah di Bidang pembangunan Daerah			
		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah OPD yang Menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	58 OPD	58 OPD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
			Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD, Renstra, RKPD)	80%	80%
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Jenis Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	4 Jenis	4 Jenis

No	Uraian		Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi
1	2		3	4	5
			Pembangunan Manusia		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	17 OPD	17 OPD
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	23 OPD	23 OPD
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Jenis Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5 Jenis	5 Jenis
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	7 Dokumen
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	7 OPD	7 OPD
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	7 OPD	7 OPD
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	1 OPD	1 OPD
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Jenis Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Jenis	2 Jenis
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang	1 OPD	1 OPD

No	Uraian		Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi
1	2		3	4	5
			Infrastruktur		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1 OPD	1 OPD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan				
			Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	63.76	64
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Jenis Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Jenis	1 Jenis
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	3 Dokumen

Sumber : DPA SKPD 2023

3.2.2. Realisasi Anggaran

Total rencana anggaran Bappeda Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023 adalah Rp. 6.394.503.700,- setelah Penetapan KUA dan PPAS Bappeda Memperoleh Anggaran Sebesar Rp. 6,294,393,530,- setelah perubahan bappeda mendapat anggaran sebesar Rp. 6,474,771,530,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.213.990.314,- atau sebesar 95,97%.

BAB 4

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Keberhasilan yang sebagian dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Dalam rangka perwujudan good governance dan sebagai tindak lanjut dari Permenpan 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah pada awal Tahun 2024 menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Adanya kendala yang dihadapi mengakibatkan pencapaian tidak optimal antara lain masalah kurangnya sumber daya terutama sumber daya manusia yang berkualitas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Bappeda Kabupaten Bener Meriah ini mudah-mudahan dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi perencanaan pembangunan dan pembinaan SDM perencana dan SDM Peneliti untuk mewujudkan perencanaan pembangunan dan inovasi daerah yang berkualitas di Kabupaten Bener Meriah.

Redelong, 02 Januari 2024
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Bener Meriah



ALPAHMI, ST.M.A.P
Nip. 19740325 200112 1 001

Digitalisasi dengan CamScanner

